

BPK APRESIASI UPAYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PERKUAT PEMANTAUAN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN

07 Mei 2026

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Hal ini disampaikan Anggota II BPK, **Daniel Lumban Tobing**, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, **Rachmat Pambudy**, di Jakarta, Selasa (5/5).



Laporan yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Tahun 2023-2025 dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2024 atas Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan merupakan bagian dari kontribusi BPK dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya pencapaian swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Anggota II BPK mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan ini BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola. "BPK juga mencatat berbagai inisiatif positif yang telah dilakukan, antara lain pengembangan fitur perencanaan RPJMN melalui aplikasi KRISNA RPJMN serta dukungan teknologi informasi melalui sistem *Integrated Digital Monitoring for Agriculture and Irrigation (IDMAI)*," ujarnya.



Sejalan dengan dinamika pembangunan, BPK memandang masih terdapat ruang penguatan pada aspek harmonisasi kebijakan, integrasi perencanaan lintas kementerian/lembaga, dan penyempurnaan kerangka pemantauan dan evaluasi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan secara nasional.

"Atas hal tersebut, BPK mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, menyempurnakan regulasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terintegrasi," sebutnya.

Sementara itu, dalam laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK mencatat bahwa hingga semester II tahun 2024, sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan BPK, yang mencerminkan komitmen kuat dari jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.

Menutup sambutannya, Anggota II BPK berharap agar sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, **Febrian Alphyanto Ruddyard**, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) II BPK, **Nelson Ambarita**, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan para Pemeriksa BPK.